

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama beberapa terakhir ini perkembangan kota – kota di Indonesia khususnya di Pulau Jawa telah dan terus mengalami percepatan baik dilihat dari aspek fisik maupun non fisik. Perkembangan fisik kota sudah melampaui batas yuridis formal administratif kota, sehingga gejala ini dapat dikatakan sangat pesat dan tidak terkendali (Sutomo, 2001). Perkembangan secara fisik banyak ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk kota yang cepat baik pertumbuhan alami maupun urbanisasi desa-kota dengan konsekuensi adanya tuntutan ketersediaan berbagai prasarana dan sarana umum dan sosial yang kesemuanya membutuhkan ruang (Sutomo, 2001).

Selain itu maraknya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, kota-kota tersebut akan menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Hal ini sering disebut dengan urbanisasi. Namun urbanisasi ini menimbulkan berbagai macam masalah karena tidak ada pengendalian di dalamnya. Masalah ini yang dihadapi negara Indonesia saat ini yaitu pertumbuhan konsentrasi penduduk yang tinggi. Lebih buruk lagi, hal ini tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi. Masalah ini akhirnya menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi berlebih (Sukirno, 2011:10).

Urbanisasi sebagai suatu proses dapat didefinisikan sebagai perubahan dari sifat bukan kota (kedesaan) menjadi kota, atau perubahan dari tingkat kota yang lebih rendah menjadi tingkat kota yang lebih tinggi (Yunus, 2006). Kota sebagai pusat aktivitas telah memberikan pengaruh yang luas, baik pengaruh ke dalam maupun perembetan ke arah luar. Pembangunan ke arah dalam ditunjukkan dengan adanya proses pemadatan bangunan pusat-pusat aktivitas, diantaranya *central business district*, *civic centre*, *education centre* dan beberapa pemerintah memperlihatkan mayoritas pembangunannya ke perdagangan, pariwisata maupun kesehatan dan olahraga.

Antisipasi pemerintah untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah baik dengan membuat kebijakan restrukturisasi ruang internal perkotaan dan pemekaran kota yang banyak memperhatikan faktor eksternal yang menonjol seperti kehadiran pendatang di kawasan koridor dan berbagai fungsi perkotaan. Dalam hal ini kebijakan yang diambil tidak dapat mengabaikan kondisi dan situasi internal sebagai landasan perencanaan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif (Branch, 1996). Kebijakan ini juga akan berimplikasi pada gejala perembetan (*urban sprawl*), invasi dan dominasi kota terhadap perdesaan di sekitarnya yang ditandai oleh konversi besar-besaran lahan pertanian menjadi non pertanian dengan kecenderungan berkembang mengikuti jalur transportasi (Yunus, 2000).

Wilayah pinggiran kota merupakan tempat tujuan utama dari gerakan penduduk atau fungsi yang telah meninggalkan wilayah perkotaan. Secara morfologis wilayah pinggiran kota adalah wilayah yang berada di antara

wilayah kekotaan dan wilayah kedesaan, sehingga kenampakan fisik morfologis wilayah pinggiran kota merupakan percampuran bentuk pemanfaatan lahan kekotaan di satu sisi, dan bentuk pemanfaatan lahan kedesaan. Secara administratif wilayah pinggiran kota ada yang masih berada di dalam batas administrasi kota, dan sebagian ada yang berada di luar batas administrasi kota atau berada di wilayah desa yang berbatasan dengan wilayah kota. Wilayah pinggiran kota dijadikan sebagai tempat tujuan karena penduduk kota memandang dapat melangsungkan kehidupan bersama keluarga dengan lebih sehat, tetapi tetap dapat menjalani aktivitas penghidupan di wilayah perkotaan tanpa harus menempuh jarak yang terlalu jauh dari tempat kerja (Christiawan, 2018).

Hal ini akan menyebabkan mengubah wilayah asal menjadi wilayah dengan sifat kekotaan, lahan produktif semakin berkurang, menyebabkan perubahan pada permukiman yang tidak teratur yang dilihat dari kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, pola jaringan jalan, penggunaan lahan dan permukiman baru (Bambulu, dkk, 2018). Kondisi diatas sedang terjadi dengan kepadatan penduduk 21,8 jiwa/ha, kepadatan bangunan 8,4 unit/Ha, dengan pola jaringan jalan koridor yang menghubungkan kota kota, penggunaan lahan kekotaan 51,58%.

Berdasarkan hasil analisis citra satelit multitemporal pada tahun 2010 dan 2020, Desa Sokaraja Kulon mengalami perubahan penggunaan lahan selama 10 tahun tersebut, yang sebelumnya berupa lahan Pertanian menjadi lahan non pertanian seluas 20,1 Ha.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Fenomena Urbanisasi spasial fisik di Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

1. Fenomena urbanisasi penggunaan lahan. Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
2. Segi spasial fisik di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Bagi Peneliti :
Memberikan fenomena urbanisasi yang terjadi di Desa Sokaraja Kulon.
2. Bagi pembaca :
Memberikan informasi kepada pembaca Fenomena Urbanisasi pada spasialnya di Desa Sokaraja Kulon.
3. Bagi Pemerintah :
Memberikan masukan bagi pemerintah terkait pengambilan kebijakan dalam pembangunan di tengah perkembangan wilayah di pinggiran kota.